

**PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN SAMBIKEREP
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

Cover	1
Daftar Isi.....	2
Bab I Pendahuluan	3
Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan	7
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	12
Bab IV Penutup	22

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Sambikerep dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2021- 2026. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Sambikerep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Sambikerep dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambikerep dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menetapkan Program dan Kegiatan Kecamatan Sambikerep Tahun 2025.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2025.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sambikerep Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438)
- 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815).

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomor klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 21 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-
- 22 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
- 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 24 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
- 25 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.
26. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 100.3.3/134/436.1.2/2025/ tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika dokumen penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Sambikerep.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kewenangan Kecamatan Sambikerep, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sambikerep.
- 1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN Sambikerep

BAB IV PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambikerep tahun 2025 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi; 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Sambikerep dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sambikerep sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K						
1	2	3	4	5		6		7		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%		
7		Unsur Kowilayahan										9	10	11						
7.01		Kecamatan																		
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			22,799,410		19,491,449		20,429,056		4,051,165	-	-	-		4,051,165		4,051,165	17,77%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1385]	99.10 %		97.45 %		99.02 %		98.73 %		-	-	-		98.73 %		98.73 %	99.63%	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,104,845				16,623,922		3,232,524	-	-	-		3,232,524		3,232,524	21.40%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1253]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-		100 %		100 %	100.00%	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1500]			15,104,845				16,623,922		3,232,524	-	-	-		3,232,524		3,232,524	21.40%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5382]	55 Orang/bulan		46 Orang/bulan		44 Orang/bulan		42 Orang/bulan		-	-	-		42 Orang/bulan		42 Orang/bulan	76.36%	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,599,059				3,717,266		807,013	-	-	-		807,013		807,013	10.62%	
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan [1551]	29 Paket		22 Paket		29 Paket		11 Paket		-	-	-		11 Paket		11 Paket	37.93%	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [3017]			7,599,059				3,717,266		807,013	-	-	-		807,013		807,013	10.62%	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5400]	29 Paket		22 Paket		29 Paket		11 Paket		-	-	-		11 Paket		11 Paket	37.93%	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,506				87,867		11,628	-	-	-		11,628		11,628	12.17%	
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan [2154]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-		100 %		100 %	100.00%	
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [3018]			95,506				87,867		11,628	-	-	-		11,628		11,628	12.17%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [5401]	50 Unit		32 Unit		50 Unit		5 Unit		-	-	-		5 Unit		5 Unit	10.00%	
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			3,443,485		29,159		112,673		15,215	-	-	-		15,215		15,215	0.44%	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat [1169]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-	-	-		0.00 %		0.00 %	0.00%	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah [1170]	100 %		99.30 %		100 %		100.00 %		-	-	-		100.00 %		100.00 %	100.00%	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan [861]	24.37 %		54.08 %		24.37 %		94.03 %		-	-	-		94.03 %		94.03 %	385.84%	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5,694				5,400		5,400	-	-	-		5,400		5,400	94.83%	
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan [1131]	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-	-		6 Lembaga		6 Lembaga	100.00%	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [1932]			5,694				5,400		5,400	-	-	-		5,400		5,400	94,83%	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [5383]	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-	-	-		1 Laporan		1 Laporan	100.00%	
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			3,422,884				79,745		9,815	-	-	-		9,815		9,815	0.29%	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan [1139]	260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		262 Lembaga		-	-	-		262 Lembaga		262 Lembaga	100.77%	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [2903]			3,422,884				79,745		9,815	-	-	-		9,815		9,815	0,29%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)										
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [5389]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			14,906			27,528		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat [1989]	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan	-	-	-	-	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00%		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat [1566]	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan	-	-	-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00%		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilmpahkan kepada Camat [1988]	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan	-	-	-	-	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00%		
7.01.02.2.04.0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [2260]			2,043			1,999		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [5387]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04.0002					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan [3249]			3,350			16,539		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan [5402]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.04.0001					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha [2258]			9,513			8,991		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan [5386]	38 Dokumen		230 Dokumen		38 Dokumen		61 Dokumen	-	-	-	-	61 Dokumen		61 Dokumen		160.53%		
7.01.03					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			8,176,538		12,228,838		13,529,970		552,474	-	-	-	-	552,474		552,474		6.76%	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi [1230]		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%		
					Persentase kelurahan yang meniadakan/juti konsep inovasi [1229]		100 %		62.50 %		87.50 %		0.00 %	-	-	-	-	0.00 %		0.00 %		0.00%		
7.01.03.2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8,005,804			13,393,696		550,074	-	-	-	-	550,074		550,074		6.87%		
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya [1460]		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan	-	-	-	-	0 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00%		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi [2078]		4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan	-	-	-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [3004]			1,422,669			3,310,057		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5391]		9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit	-	-	-	-	0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [3005]			499,855			2,304,606		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5392]		2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit	-	-	-	-	0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [3006]			1,412,480			1,004,357		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5393]		7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit	-	-	-	-	0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [3007]			307,061			3,253,508		0	-	-	-	-	0		0		0.00%		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5394]		2 Unit		15 Unit		2 Unit		0 Unit	-	-	-	-	0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [3008]			1,518,871			1,432,800		225,402	-	-	-	-	225,402		225,402		14,84%		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5395]		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [3009]			1,418,571			1,221,600		198,028	-	-	-	-	198,028		198,028		13,96%		
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5396]		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%		
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [3010]			833,579			536,810		80,144	-	-	-	-	80,144		80,144		9,61%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)												
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
							Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5397]	3 Pokmas / Omas		3 Pokmas / Omas		3 Pokmas / Omas		0 Pokmas / Omas		-	-	-		0 Pokmas / Omas		0 Pokmas / Omas		0.00%			
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [3011]		587,694			324.558			46.500	-	-	-			46.500		46.500		7,91%		
							Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5398]	3 Pokmas / Omas		3 Pokmas / Omas		3 Pokmas / Omas		0 Pokmas / Omas		-	-	-		0 Pokmas / Omas		0 Pokmas / Omas		0.00%			
7.01.03.2.02.0001							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [3001]		5,025			5.400			0	-	-	-		0		0		0,00%			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [5390]	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-	-	-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00%			
7.01.03.2.03							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		170,734			136,274			2.400	-	-	-		2.400		2.400		1,41%			
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan [2281]	37 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		0 Lembaga		-	-	-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%			
							Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi. [2240]	148 Lembaga		149 Lembaga		148 Lembaga		36 Lembaga		-	-	-		36 Lembaga		36 Lembaga		24,32%			
7.01.03.2.03.0004							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [3013]		15,312			14.978			2.400	-	-	-		2.400		2.400		15,67%			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [5399]	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		12 Laporan		-	-	-		12 Laporan		12 Laporan		25,00%			
7.01.03.2.03.0003							Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan [4685]		155,422			121.296			0	-	-	-		0		0		0,00%			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan [6866]	37 Unit		38 Unit		38 Unit		0 Unit		-	-	-		0 Unit		0 Unit		0.00%			
7.01.04							Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		199,767		150,101		147,515		24,567	-	-	-		24,567		24,567		12,30%			
							Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan [904]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
7.01.04.2.01							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		199,767			147,515			24,567	-	-	-		24,567		24,567		12,30%			
							Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan diterbitkan [1110]	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		-	-	-		15 Lokasi		15 Lokasi		100.00%			
7.01.04.2.01.0001							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [2137]		199,767			147,515			24,567	-	-	-		24,567		24,567		12,30%			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [5384]	360 Laporan		360 Laporan		360 Laporan		90 Laporan		-	-	-		90 Laporan		90 Laporan		25,00%			
7.01.05							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		24,118		13,754		14,764		1,789	-	-	-		1,789		1,789		7,42%			
							Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan [914]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
7.01.05.2.01							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		24,118			14,764			1,789	-	-	-		1,789		1,789		7,42%			
							Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [1121]	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		9 Kasus		-	-	-		9 Kasus		9 Kasus		24,32%			
							Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional [1990]	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		-	-	-		0 Topik		0 Topik		0.00%			
7.01.05.2.01.0002							Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [2875]		16,079			6.900			0	-	-	-		0		0		0,00%			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [5388]	80 Orang		80 Orang		80 Orang		0 Orang		-	-	-		0 Orang		0 Orang		0.00%			
7.01.05.2.01.0005							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan [2155]		8,039			7.864			1.789	-	-	-		1.789		1.789		22,25%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K							Rp. (000)
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan [5385]	37 Laporan		37 Laporan		37 Laporan		9 Laporan		-	-	-	-	9 Laporan		9 Laporan		24.32%	

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****III.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan konsep program yang akan disusun dalam RPJMD dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan- peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Untuk mewujudkan kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program/kegiatan/sub kegiatan ditetapkan Indikator kinerja, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, adalah :

- **Pencapaian visi dan misi kepala daerah,**

Perumusan program dan kegiatan di kecamatan Sambikerep diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Perubahan Renja 2025 kecamatan Sambikerep merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota terpilih.

- **Pencapaian SDGs,**

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai pengertian pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya, dalam upayanya memenuhi target SDGs sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban mencapai target-target SDGs ini.

Program dan kegiatan yang dirancang dalam Perubahan Renja 2025 kecamatan Sambikerep diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs ini dalam lingkup kecamatan.

- **Pengentasan kemiskinan,**

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upayanya mengentas kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Surabaya. Program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk menciptakan kondisi memudahkan masyarakat miskin (MBR) untuk mendapat akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

- **Pencapaian SPM**

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya, untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Kecamatan tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kecamatan dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan kota Surabaya
2. Kecamatan berkontribusi terhadap pokok visi Kota Surabaya yaitu Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
3. Kecamatan turut berperan dan berkontribusi dalam pencapaian Misi Ke 4 (empat) yaitu “memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik” dan memiliki tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif
4. Kecamatan memiliki 3 sasaran Perangkat Daerah yaitu
 - Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan Sambikerep
 - Meningkatkan kualitas layanan kecamatan

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan, ketentraman dan ketertiban umum
- 5. Kecamatan melaksanakan program-program pembangunan sebanyak 5 program yang bersifat rutin untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah dan telah selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana tersebut dalam angka 1.
- 6. Penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah terkait dana kelurahan yang diwujudkan menjadi kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tahun 2025 Kecamatan Sambikerep menjalankan 5 Program, 10 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung 3 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 - Penangan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung 1 sub kegiatan yaitu :
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik didukung 5 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di wilayah kecamatan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung 15 sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beringin
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontar
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Made
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambikerep
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Beringin
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lontar
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Made
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambikerep
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

c. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sambikerep, sifat penyebarannya diseluruh wilayah Kecamatan Sambikerep yang melingkupi semua Kelurahan wilayah Kecamatan Sambikerep.

Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sambikerep tidak lepas dari Renja yang telah disusun, supaya sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Kecamatan Sambikerep mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Kota Surabaya, agar terwujud pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, diharapkan kerjasama yang baik seluruh elemen masyarakat, pihak swasta dan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Sambikerep
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02 %	20,429,055,861	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99,02 %	20,925,526,822	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,623,922,362	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,486,325,802	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	16,623,922,362	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	16,486,325,802	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	3,717,266,499	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	4,351,334,020	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	3,717,266,499	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	4,351,334,020	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	87,867,000	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	87,867,000	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87,867,000	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	87,867,000	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	112,673,201	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	112,673,201	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	5,400,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	5,400,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,400,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,400,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	79,744,800	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	262 Lembaga	79,744,800	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,744,800	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,744,800	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	27,528,401	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	27,528,401	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	8,990,664	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerep	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	144 Dokumen	8,990,664	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	16,539,022	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	16,539,022	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,998,715	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,998,715	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	13,529,969,702	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50 %	13,541,016,302	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,393,695,709	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,393,695,709	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,400,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,400,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,310,056,733	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,298,975,651	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2 Unit	2,304,606,479	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	13 Unit	2,306,768,566	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Prasarana Kelurahan		Terbangun			Prasarana Kelurahan		Terbangun			
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,004,356,681	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,004,356,681	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,253,508,059	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	3,253,508,059	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,432,800,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,443,881,082	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,600,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,221,600,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	536,809,921	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	534,647,834	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	324,557,836	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	324,557,836	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	136,273,993	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	147,320,593	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	121,296,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	132,342,600	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,977,993	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,977,993	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	147,515,100	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	147,515,100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	147,515,100	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	147,515,100	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	147,515,100	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	147,515,100	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	14,763,840	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	14,763,840	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	37 Kasus	14,763,840	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	37 Kasus	14,763,840	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		bersama Babinsa/Babinkamtibmas			Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		bersama Babinsa/Babinkamtibmas			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	6,900,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	6,900,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	37 Laporan	7,863,840	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Sambikerep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	37 Laporan	7,863,840	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sambikerep pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 6 Agustus 2025
Camat Sambikerep
Kota Surabaya



IIN TRISNONINGSIH, S.STP, M.Si

Pembina Tk I / IV b
197904261998022001

